

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM  
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEBERSIHAN KELURAHAN  
(Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai  
Utara Kota Tanjungbalai)**

**TESIS**

**OLEH**

**NURMIAH  
NPM. 171801053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM  
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEBERSIHAN KELURAHAN  
(Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai  
Utara Kota Tanjungbalai)**

**T E S I S**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

OLEH

**NURMIAH  
NPM. 171801053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program  
Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan (Di Kelurahan  
Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara  
Kota Tanjungbalai)**

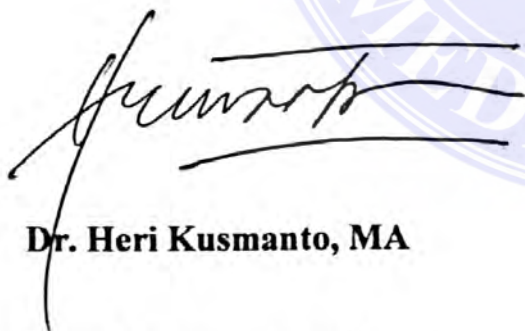
**N a m a : Nurmiah**

**N P M : 171801053**

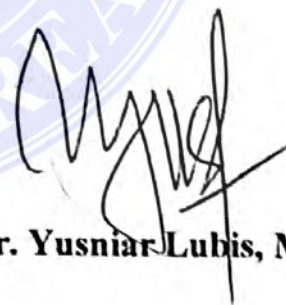
**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



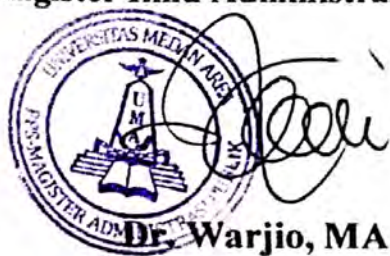
**Dr. Heri Kusmanto, MA**



**Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M.MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**



**Dr. Warjio, MA**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20

**Telah diuji pada tanggal 8 April 2019**

---

---

**N a m a : Nurmiah**

**N P M : 171801053**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Dra.Hj.Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

**Sekretaris: Ir. Azwana, MP**

**Pembimbing I: Dr. Heri Kusmanto, MA**

**Pembimbing II: Prof.Dr.Ir.Yusniar Lubis, MMA**

**Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2019

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

TGL. 20

70806AFF772323589

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

(Nurmiah)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KEBERSIHAN KELURAHAN (Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)”**, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, April 2019

Penulis

(Nurmiah)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KEBERSIHAN KELURAHAN (Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai).**

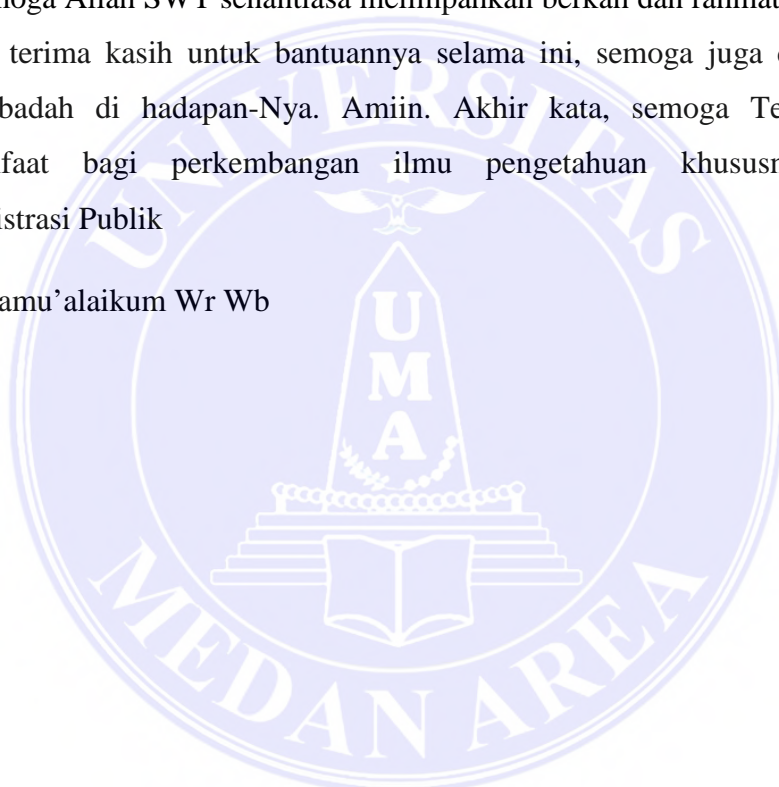
Dalam penelitian penulis telah banyak mendapat saran dan masukan oleh dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada:

- Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc,M.Eng
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS
- Ketua program Studi Magister Administrasi Publik,Dr.Warjio,MA
- Komisi pembimbing I: Bapak Dr.Heri Kusmanto,MA yang telah bersedia meluangkan waktu, memotivasi sehingga penyusunan tesis ini tepat pada waktunya.
- Komisi pembimbing II : Ibu Prof.Dr.Ir.Yusniar Lubis, MMA yang telah banyak memberikan saran dan arahan guna membangkitkan semangat juang peneliti dalam penyusunan tesis ini.
- Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik.
- Seluruh keluarga besar, saya ucapkan terimakasih, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

- Teman-teman Magister Administrasi Publik 17, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita dalam menggapai impian.
- Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Kepada Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan telah memberikan izin kepada saya dalam melaksanakan penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amiin. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Magister Administrasi Publik

Wassalamu'alaikum Wr Wb





## ABSTRAK

Judul

### **ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KEBERSIHAN KELURAHAN (Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)**

Kebersihan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV cukup memprihatinkan, karena ketidak sadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Sehingga hal ini menyebabkan berbagai jenis penyakit, banjir dan tumpukan-tumpukan sampah yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis kinerja dan hambatan Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kebersihan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengambil informan dari aparat Kelurahan, TP-PKK dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara dalam pelaksanaan program pemberdayaan kebersihan Kelurahan dikatakan baik, karena Kelurahan telah membentuk TP-PKK untuk membuat program Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS) dengan 10 kegiatan dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pemberdayaan Kelurahan. Jika dilihat dari dimensi Akuntabilitas aparat yang sudah cukup baik dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. Dilihat dari Responsibilitas sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak Kelurahan dalam meminimalisir keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Dan responsivitas aparat Kelurahan Tanjungbalai Kota IV cukup baik yang dilihat dari komitmen dan tindakan aparat Kelurahan yang sangat intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kegiatan kelestarian lingkungan hidup dapat membawa lingkungan bersih dan aman, Dengan Hambatan, ketidakpedulian sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan aman, serta kesibukkan masyarakat diluar rumah yang menyebabkan ketidak pedulian dalam organisasi pemerintahan dan pembangunan.

***Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Program Pemberdayaan, Kebersihan.***

## **A B S T R A C T**

### ***Title***

### ***PERFORMANCE ANALYSIS OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE VILLAGE CLEANLINESS EMPOWERMENT PROGRAM (In Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)***

The cleanliness of Tanjungbalai City IV Urban Village is quite alarming, because the public is not aware of maintaining the environment and disposing of garbage in its place. So that this causes various types of diseases, floods and piles of rubbish which ultimately impacts on public health in Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. The purpose of this study was to analyze the performance and constraints of the Kelurahan in implementing the Kelurahan cleanliness empowerment program in Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. This research was carried out qualitatively by taking informants from Kelurahan officials, TP-PKK and the community.

The results showed that Tanjungbalai Kota IV Kelurahan Tanjungbalai Utara Performance in implementing the Kelurahan hygiene empowerment program was said to be good, because the Kelurahan had established TP-PKK to create a Clean and Healthy Behavior Program (PHBS) with 10 activities and in accordance with their duties and responsibilities in order to empower Kelurahan. If seen from the apparatus accountability dimension which is already quite good with the commitment and sincerity of the Kelurahan apparatus in carrying out their duties and functions in terms of implementing the Kelurahan Tanjungbalai Kota IV empowerment program. Judging from the responsibility is good enough this can be seen from the ability of the Kelurahan in minimizing complaints submitted by the community. And the responsiveness of the Tanjungbalai City IV Village apparatus is quite good as seen from the commitment and actions of the Kelurahan officials who are very intense in socializing to the community so that environmental conservation activities can bring a clean and safe environment, With obstacles, ignorance of some communities in maintaining a clean and safe environment and the busyness of the community outside the home which causes ignorance in the organization of government and development.

***Keywords: Government Performance, Empowerment, Hygiene Program.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

• Latar Belakang Masalah	1
• Rumusan Masalah	7
• Tujuan Penelitian	7
• Manfaat Penelitian	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Kinerja	9
2.2. Pengertian Organisasi	12
2.3. Kinerja Organisasi dan faktor yang mempengaruhinya	15
2.4. Mengukur Kinerja Organisasi	18
2.5. Pemberdayaan	20
2.6. Pemberdayaan Kelurahan	23
2.7. Penelitian Terdahulu	32
2.8. Kerangka Pemikiran	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2 Bentuk Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Informan Penelitian	36
3.5 Teknik Analisis Data	37
3.6 Definisi Konseptual dan Operasional	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Gambaran Umum Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	40
4.1.2. Keadaan wilayah dan kependudukan	41
4.1.3. Tugas pokok dan fungsi Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	43
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	51
4.2. Hasil Pembahasan	52
4.2.1. Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	56
4.2.2. Hambatan-hambatan dalam Kegiatan Pemberdayaan Kebersihan	81

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Pemikiran .....	34
4.1. Struktur TP-PKK .....	57





## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Periode Jabatan Lurah.....	40
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	42
Tabel 4.3. Keadaan aparatur Kota Tanjungbalai.....	43
Tabel 4.4. Sarana Pendidikan .....	53
Tabel 4.5. Sarana Kesehatan .....	54
Tabel 4.6. Tenaga Medis yang buka praktek di Kelurahan.....	54
Tabel 4.7. Jumlah penerima KIS dan BPJS Kesehatan .....	55
Tabel 4.8. Daftar penerima Raskin dan Beras Madani .....	55
Tabel 4.9. Pelaksanaan Pemeliharaan Lingkungan.....	65
Tabel 4.10. Kelompok Masyarakat .....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada. Selanjutnya J.Kaloh (2002) menyatakan, pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayan kepada masyarakat (*service*), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*), dan pemberdayaan (*empowering*).

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan Tanjungbalai Kota IV untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari Kelurahan lainnya dalam memacu gerak pembangunan. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu

organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melaksanakan tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (*performance*) merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment* (Keban, 1995). Sehubungan dengan tuntutan pembangunan di era otonomi, Pemerintah Kota Tanjungbalai mengambil kebijakan “Program Pemberdayaan Kelurahan”. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Tanjungbalai dalam hal :

1. Kebersihan
2. Keamanan
3. Ketertiban
4. Pembinaan Masyarakat
5. Pelayanan Masyarakat

Dimana Kelurahan merupakan dasar dari satuan Pemerintahan Kota yang terkecil dari suatu komunitas Pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut

berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintahan Kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak Kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di Kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia.

Dimana ini juga merupakan bagian akibat dari berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun saat ini masih jauh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu juga ada kecenderungan ketidakadilan didalam pelayanan yang diberikan, dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit untuk mendapat pelayanan yang baik dan berkualitas dari pihak Kelurahan. Sebaiknya masyarakat yang memiliki uang akan lebih mudah dalam menyelesaikan urusannya. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks untuk memperoleh pelayanan, peningkatan ekonomi

yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Diakatakan sebagai ujung tombak karena Kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu Kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran Kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambah dengan pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kelurahan Tanjungbalai Kota IV mengkondisikan perlunya suatu upaya Pemberdayaan Kelurahan, salah satunya adalah “Program Kebersihan”.



Kelurahan Tanjungbalai Kota IV sebagai salah satu Kelurahan dari lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjungbalai Utara, memiliki luas wilayah 14,325 Ha dan 5 (lima) lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 4104 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 2068 jiwa, penduduk perempuan 2036 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.205 KK dalam pelaksanaan program pemberdayaan Kelurahan telah melaksanakan berbagai program yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satu program Pemberdayaan Kelurahan yang dilakukan oleh Kelurahan Tanjungbalai Kota IV ialah Kebersihan Lingkungan. Kebersihan lingkungan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV belum dapat ditanggapi/direspon secara keseluruhan oleh pihak Kelurahan Tanjungbalai Kota IV serta ketidak sadaran sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga hal ini menyebabkan berbagai jenis penyakit, banjir dan tumpukan-tumpukan sampah yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV.

Berangkat dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa saat ini aparat Kelurahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencapaian hasil maksimal dari program pemberdayaan Kelurahan ini. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut diperlukan kemampuan dan kinerja aparat yang maksimal serta kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kinerja aparat Kelurahan menjadi faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan pemberdayaan Kelurahan ini.

Persoalan utama yang dihadapi oleh Pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan kebersihan pihak pemerintah Kelurahan harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta kendala apa yang ada dalam era otonomi ini serta pemberdayaan yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi harapan pelanggan yaitu masyarakat di Kelurahan yang memerlukan kinerja aparat secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance* di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap organisasi publik. ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ***“Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan (Di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai)”***.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai?
2. Apa saja hambatan kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah merupakan rangkuman kalimat yang memuat pernyataan yang menunjukkan adanya hal yang di peroleh setelah penelitian di kerjakan. Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
2. Untuk menggambarkan kendala dalam kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

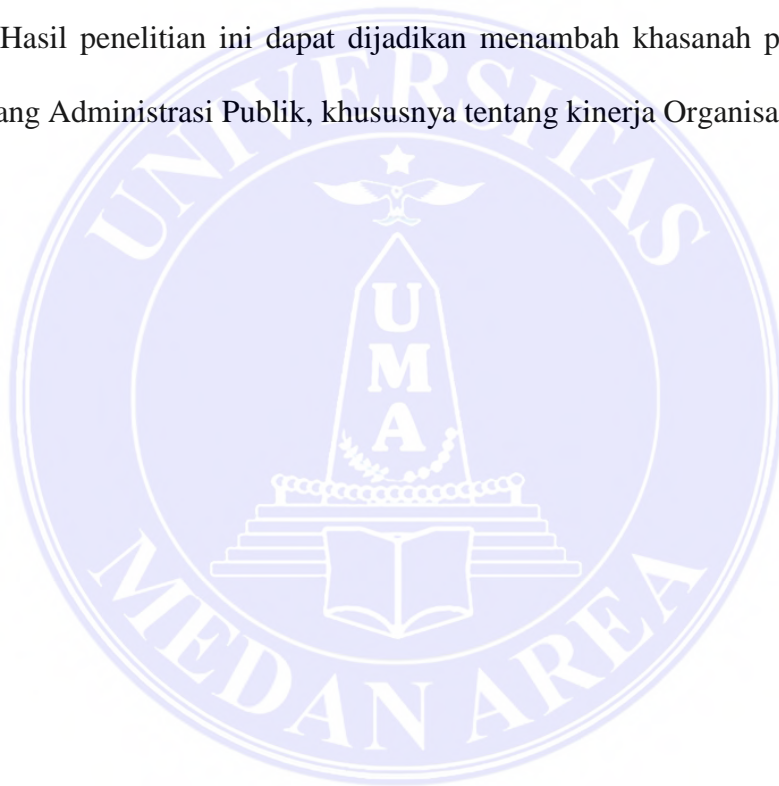
Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya peningkatan program pemberdayaan Kelurahan di Kota Tanjungbalai.

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan menambah khasanah pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya tentang kinerja Organisasi Publik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period.* Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu (Ruky dalam Diah, 2014).Selanjutnya Kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai (Irawan dalam Diah, 2014).

Selain pendapat di atas, pendapat lainnya juga sebagai berikut : Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi *aktual* karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja



karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya (Dessler dalam Diah, 2014). Dan selain itu Kinerja juga dapat dikatakan “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan” (Veizal dalam Deddy, 2015). Selain pendapat di atas Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan” (Robert dalam Deddy, 2015).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mahsum dalam Mulyadi, 2015)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, hal lainnya juga dikemukakan oleh para ahli lainnya yaitu kinerja adalah tingkat kompetensi terhadap pekerjaan yang diberikan dalam tatanan kesatuan strategi yang mendukung sistem kerja berdasarkan *team work*. Untuk mengetahui seseorang mempunyai kinerja atau tidak maka dapat dilakukan melalui penilaian. Penilaian (*Performance Appraisal*) dapat dilakukan dengan membandingkan prestasi aktual pegawai dengan rencana kinerja yang diharapkan organisasi, penilaian kinerja memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi di tempat kerja. Pegawai menginginkan dan memerlukan penghargaan berkenaan dengan kinerja dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan kompensasi terhadap pegawai. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan

kesempatan untuk meninjau kemampuan pegawai dan menyusun rencana peningkatan kinerja (Dessler, 2002:71).

Penilaian kinerja (*Performance Appraisal*) adalah suatu proses melalui manajemen organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja pegawai. Kinerja ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan kepersonaliaan dan memberikan upah baik bagi pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penilaian kinerja pegawai tidak hanya menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang dan tingkatan pekerjaan. Sedangkan menurut Simanjuntak (2005:22) karakteristik dari penilaian kinerja meliputi :

- a. Fokus pada individual
- b. Ada harapan dan standar dari kinerja
- c. Biasanya melibatkan dua bagian antara pegawai dengan penilai yang satu mewujudkan standar dan lainnya mereview kinerja
- d. Penilaian biasanya seseorang yang memiliki wewenang manajemen ini atas seorang penilai
- e. Sisi penilaian memberikan kesimpulan tertulis berkenaan dengan kinerja seseorang yang direview
- f. Konsekuensi dari penilaian kinerja bahwa organisasi secara langsung menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja (*pay for performance*) dan banyak perusahaan menggunakan *appraisal* sebagai dasar untuk mempromosikan pegawai.

## 2.2. Pengertian Organisasi

Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan apabila para manajer dan anggotanya mengerti dan memahami dengan benar tentang organisasi. Karena, organisasi tersebut dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku dan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, pendefinisian organisasi yang banyak dilakukan oleh para ahli sekurang-kurangnya mempunyai unsur-unsur adanya manusia atau orang-orang yang bekerjasama, adanya kerjasama itu sendiri, dan adanya tujuan organisasi yang lebih disepakati.

Definisi organisasi dari beberapa pandangan ahli organisasi tersebut diatas maka selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan organisasi secara sederhana, sebagai berikut : “Organisasi adalah merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut”.

Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandangan, antara lain :

#### 1. Organisasi sebagai wadah

Organisasi adalah merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja yakni kegiatan administrasi dan manajemen. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya. Pengertian demikian ini merupakan organisasi yang bersifat “statis” karena hanya melihat strukturnya saja. Dikatakan oleh Soewarno Handyaningrat (2002:42) memberikan penjelasan sebagai wadah yang sifatnya statis, karena setiap orang dalam wadah ini harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta hubungan dan tata kerjanya.

Oleh karena itu dalam organisasi yang dipandang sebagai wadah aktifitas maka pola struktur harus atas dasar landasan yang kuat serta pemikiran yang benar-benar berorientasi pada masa depan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi adanya perubahan dimasa datang misalnya perubahan tujuan, perubahan aktivitas yang menuntut adanya perubahan yang mendasar dan strukturnya tidak harus berubah.

#### 2. Organisasi sebagai suatu Proses Pembagian Kerja

Organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja melihat bahwa adanya unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, adanya kerjasama dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok dan kelompok dengan kelompok. Hubungan-hubungan ini terjadi karena adanya pembagian kerja yang telah jelas dalam suatu sistem. Kerjasama dalam suatu sistem yang teratur ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.

### 3. Organisasi sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan

Manusia mendirikan suatu organisasi karena adanya beberapa tujuan dari individu dan hanya akan tercapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan atau adanya persetujuan bersama. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka dengan cara kerjasama akan dapat meringankan, mengefektifkan, mengefisienkan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama.

Gibson (2002:3) dalam kaitannya dengan tujuan maka organisasi itu mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat baik dalam bidang profit maupun jasa (pelayanan). Tujuan organisasi akan tercapai bilamana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi sadar akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.



### 2.3.Kinerja Organisasi dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Sebelum membahas masalah kinerja organisasi, terlebih dahulu perlu di bahas tentang masalah organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Supardi dan Anwar, 2002:43). Lebih lanjut Etzioni, menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri :

- a. Adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggungjawab berkomunikasi, pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus.
- b. Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan pengawasan. Usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjuk secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya yang meningkatkan efisiensi.
- c. Pengaturan personil misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lain untuk melaksanakan tugasnya.

Sedangkan Henry dalam Supardi dan Anwar (2002:43) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (*impersonal*), ditandai oleh aktifitas kerjasama, terintegrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu dan tanggungjawab kepada hubungan dengan lingkungannya.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Jackson dan Morgan dalam Supardi dan Anwar (2002:48) yang mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Keban dalam Supardi dan Anwar (2002:31) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*the degree of accomplishment*” atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah organisasi banyak pendapat para pakar dengan menggunakan indikator dan konsep, seperti efektivitas, efisiensi dan juga produktivitas untuk menentukan sejauh mana kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Namun konsep dan indikator yang dikemukakan selalu saja hanya tepat digunakan bagi organisasi swasta yang berorientasi keuntungan belaka, hal ini tentunya berbeda dengan organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat banyak tanpa mengejar keuntungan materi. Namun orientasi untuk pelayanan publik bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk menuju suatu pemerintahan yang *good governance*.

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi.

Menurut Mathis dan Jackson (2002:45) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi :

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Mangkunegara (2000:75)

1. Faktor kemampuan *Ability* secara psikologis, kemampuan *ability* terdiri dari kemampuan potensi *IQ* dan kemampuan *reality knowledge + skill*. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki *IQ Superior, Very superior, Gifted*

dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal.

2. Faktor motivasi *motivation*, motivasi diartikan sebagai suatu sikap *attitude* pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja *situation* dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif *Fro* terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

#### **2.4. Mengukur Kinerja Organisasi**

Bagi organisasi Pemerintahan maka kinerja yang dilakukannya adalah kinerja yang berhubungan dengan pelayanan publik. Simanjuntak (2005:50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasarkan adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja Organisasi Publik tidak hanya bisa dilihat

dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

*b. Responsibilitas*

*Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang *eksplisit* maupun *implisit*. Oleh sebab itu, *Responsibilitas* bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan *responsivitas*.

*c. Responsivitas*

*Responsivitas* adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat *responsivitas* disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsivitas* dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena *responsivitas* secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Responsivitas* yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.



Organisasi yang memiliki *responsivitas* rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

## 2.5.Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Shardlow dalam Khairuddin (2002:75) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk

mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran.

Konsep Pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dan kemandirian. Menurut Kartasasmita dalam Khairuddin (2002:78) keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat dimaksud adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan dan sebagainya.

Secara Etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan bertenaga. Menurut Sumadiningrat dalam Khairuddin (2002:79) pengertian pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Perserikatan bangsa-bangsa untuk program pembangunan (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Atau pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan ketertiban langsung penduduk dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan (*empowerment*) dalam studi kepustakaan memiliki kecenderungan dalam dua proses. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagai kekuasaan,

kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Dan *Kedua*, menekankan pada proses *menstimulasi*, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Prijono dalam Khairuddin (2002:79), pemberdayaan terdiri dari pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik. Pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan yang lain, yaitu:

1. Pemberdayaan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak.
2. Pemberdayaan ekonomi. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Sehingga dengan faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan.
3. Pemberdayaan sosial budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembedaan-pembedaan peran dan tanggung jawan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama.

4. Pemberdayaan Psikologi. Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerjasama, untuk mencapai dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.
5. Pemberdayaan politik. Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik. Seperti kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, keterlibatan lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat dan menyampaikan hak suara dan lain sebagainya.

## **2.6.Pemberdayaan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Kelurahan merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan guna peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui usaha peningkatan partisipasi masyarakat serta untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan ini:

1. Kelurahan adalah penyelenggara dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa)
2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang
3. Kelurahan merupakan perangkat Kota Tanjungbalai. (UU Nomor 32 Tahun 2004)
4. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi rakyat. (UU Nomor 32 Tahun 2004)
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan. (Kemendagri Nomor 64 Tahun 1999)
6. Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah dengan melibatkan masyarakat melalui BPD. (Kemendagri Nomor 65 Tahun 1999)



Pemberdayaan Kelurahan Kota Tanjungbalai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memikul tanggung jawab sebagai ujung tombak pembangunan terendah di Daerah. Pemberdayaan Kelurahan jika dilihat dari dasar pertimbangan produk hukum saat ini merupakan suatu keharusan karena menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Daerah tanpa power adalah suatu kemustahilan. Sementara Perda Nomor 24 Tahun 1992 menggariskan bahwa pemerintah Kelurahan dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Melihat ketentuan diatas maka peranan Kelurahan harus diperluas tidak hanya sebagai administrator Pemerintahan tetapi juga sektor lain. Hal ini tentu saja juga berdasarkan pada adanya hubungan langsung yang sangat dekat antara Pemerintah dan masyarakat. Dengan fungsi dan peran yang sangat strategis tersebut maka Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan pemberdayaan Kelurahan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan dengan upaya antara lain :

1. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang atas beberapa fungsi pelayanan dan pengawasan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
2. Penataan terhadap kekuatan dan kemampuan Pemerintah Kelurahan dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia, kelengkapan personil dan penambahan dukungan dana.

### 3. Sumber Daya Manusia

Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dapat secara langsung menopang tugas-tugas aparatur Kelurahan maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengupdate teknologi informasi.

### 4. Fasilitas

Fasilitas pendukung dan dana operasional untuk sebagian Kelurahan di Indonesia masih belum sempurna seperti peralatan komputer dan lain-lain, sehingga untuk pembuatan data-data potensi Kelurahan dan analisa proyeksi pengembangan Kelurahan kedepan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Tanjungbalai mengambil langkah-langkah nyata yang disusun dalam suatu program yang disebut Pemberdayaan Kelurahan.

Menurut Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2016 tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Kelurahan didalam program Pemberdayaan Kelurahan agar melakukan kegiatan-kegiatan seperti :

#### 1. Kebersihan

- a. Mengawasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian di lingkungannya masing-masing dan menjaga agar tidak ada lagi sampah yang berserakan/bertumpuk-tumpuk.
- b. Melaksanakan pengangkutan sampah dari rumah masyarakat dan yang berserakan ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan.

- c. Mengontrol dan mengawasi penggunaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) agar sampah-sampah tidak melimpah dan berserakan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah.
- d. Melaksanakan penyapuan terhadap jalan-jalan protokol dan jalan-jalan lainnya yang berada di wilayah kerjanya dan memerintahkan petugas kebersihan agar mematuhi dan melaksanakan tugasnya sesuai wilayah kerja dan jam kerja yang telah ditentukan.
- e. Mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah kedalam parit dan membersihkan sampah-sampah yang ada dalam parit agar air mengalir dengan lancar.
- f. Menggerakkan masyarakat melaksanakan gotong royong pada hari jumat dan minggu untuk membersihkan parit yang tersumbat agar tidak terjadi banjir apabila hujan turun.
- g. Melaksanakan pembersihan dan perawatan terhadap lokasi tanah kuburan yang berada di wilayah kerjanya,
- h. Melaksanakan Pembersihan saluran dan pengangkatan tumpukan-tumpukan tanah yang berada di brem jalan atau badan jalan agar air yang berada di badan jalan dapat mengalir dengan lancar kedalam parit.
- i. Melaksanakan pengorekan parit-parit sampai boodem (dasar saluran) agar air dalam parit berjalan lancar.
- j. Melakukan pengawasan terhadap petugas pengangkut sampah dan petugas penyapu jalan yang ada di wilayah kerjanya dalam melaksanakan tugas kebersihan.

- k. Melaksanakan pemotongan rumput di pinggir jalan dan pengecatan trotoar.
  - l. Memelihara pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota dan fasilitas umum lainnya yang telah ditanam serta dibangun oleh Pemerintah Kota atau swadaya masyarakat.
  - m. Mengawasi pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota serta fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah atau swadaya masyarakat dari kerusakan-kerusakan yang dilaksanakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
  - n. Mengerakkan peran serta masyarakat untuk menanam, memelihara dan menjaga pohon-pohon penghijauan, taman-taman kota serta fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Keamanan
- a. Mengerakkan masyarakat untuk membangun pos-pos siskamling di setiap lingkungan masing-masing.
  - b. Mengaktifkan siskamling dan Pam Swakarsa di wilayah kerjanya masing-masing
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan agar gangguan keamanan dapat terkendali.
  - d. Memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan pemasangan lampu-lampu di depan ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing.
  - e. Memerintahkan masyarakat untuk menghidupkan lampu-lampu yang telah dipasang di depan ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing mulai pukul 19:00 s/d 05:00 WIB (Pagi).

- f. Mengawasi masyarakat dalam pengambilan/penyambungan aliran listrik untuk kebutuhanh lampu neon harus melalui meteran ruko atau rumah tempat tinggal masing-masing.
- g. Mengawasi dan melaporkan lampu penerangan jalan yang mati ataupun rusak (tidak hidup) ke Dinas Pertamanan Kota Tanjungbalai.

### 3. Ketertiban

- a. Menata pedagang-pedagang kaki lima agar berjualan pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau jalan-jalan alternatif yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.
- b. Menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau diatas parit pada jalan-jalan protokol dan Afastrotour bus bersama denga Camat.
- c. Mengawasi masyarakat agar tidak membangun bangunan tanpa izin dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan galian-galian yang dilaksanakan oleh PLN,Telkom, PN GAS dan PDAM serta jalan-jalan yang berlobang dan rusak, selanjutnya melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
- e. Memerintahkan masyarakat agar tidak menutup/membeton parit-parit yang ada di depan rumah tokonya.
- f. Mengawasi dan menindak masyarakat agar memelihara hewan berkaki empat yang dipelihara di tempat-tempat dilarang Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Menjaga dan memelihara rambu-rambu lalu lintas agar tidak dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.



#### 4. Pembinaan Masyarakat

- a. Melaksanakan tatap muka dengan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat dengan menjelaskan program-program Pemerintah yang belum, sedang dan akan dilaksanakan disetiap kesempatan yang ada.
- b. Menghadiri setiap undangan masyarakat dan menghimbau peran aktif warga untuk membangun wilayahnya masing-masing.
- c. Memelihara dan meningkatkan taraf kesehatan serta gizi warga masyarakat serta membina dan meningkatkan akseptor KB yang mandiri serta membina dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung penghasilan tambahan keluarga.
- d. Harus tampil di tengah-tengah masyarakat dalam situasi/keadaan tertentu dan mampu menyelesaikan masalah yang ada secara arif dan bijaksana.
- e. Menyusun dan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan pemberian fasilitas-fasilitas kemudahan/kesempatan/kelancaran administrasi, pelatihan, permodalan, pemasaran melalui kerja sama dengan instansi sektoral.

#### 5. Pelayanan Masyarakat

- a. Melaksanakan pendataan terhadap masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan memerintahkan untuk mengurusnya dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pelayanan pengurusan KK dan KTP kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tetap mempedomani tarif KK, KTP berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

- c. Melaksanakan pengawasan dan weeping terhadap penduduk yang masuk wilayahnya dan wajib lapor 1 X 24 jam kepada kepala lingkungan masing-masing.
- d. Melaksanakan pelayanan berupa pemberian surat-surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak mempersulit/membebani masyarakat yang bersangkutan.
- e. Melaksanakan penyelesaian pengurusan suart-surat keterangan tanah dan melakukan pengecekan terhadap bidang tanah yang akan dimohonkan haknya kepada kantor BPN Medan, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Mempererat semua urusan pelayanan masyarakat, tidak mempersulit dengan tidak membebani biaya yang tidak diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara kinerja aparaturn Kelurahan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelurahan, dimana Kelurahan tidak hanya sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain, seperti sektor pembangunan dan kemasyarakatan.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Rotic Makapuas, 2017. Dengan judul “Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan dalam rangka Pelayanan Masyarakat (Studi di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten SITARO) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan Kelurahan dalam hal administrasi kependudukan belum maksimal, masih adanya aparat pelaksana di Kelurahan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Pemerintah Kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Hasil penelitian Muh.Zulkarnain, 2017. Dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gawo”. Dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya peran Pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan bantuan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam penelitian ini ialah keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.
3. Hasil penelitian Hendra Dermawan, 2008. Dengan judul “Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia). Dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kelurahan Polonia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan dan mengimplementasikan Instruksi tersebut. Kinerja Pemerintah Polonia sudah dapat dikatakan baik,

hal ini dapat dilihat dari baiknya akuntabilitas, responsivitas dan tanggung jawab dari Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

4. Hasil penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah studi pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutem, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga hal dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Sinar Lestari yaitu : a) adanya tahap penyadaran, b) tahap pembekalan keterampilan dan c) tahap partisipasi.

## **2.8. Kerangka Pemikiran**

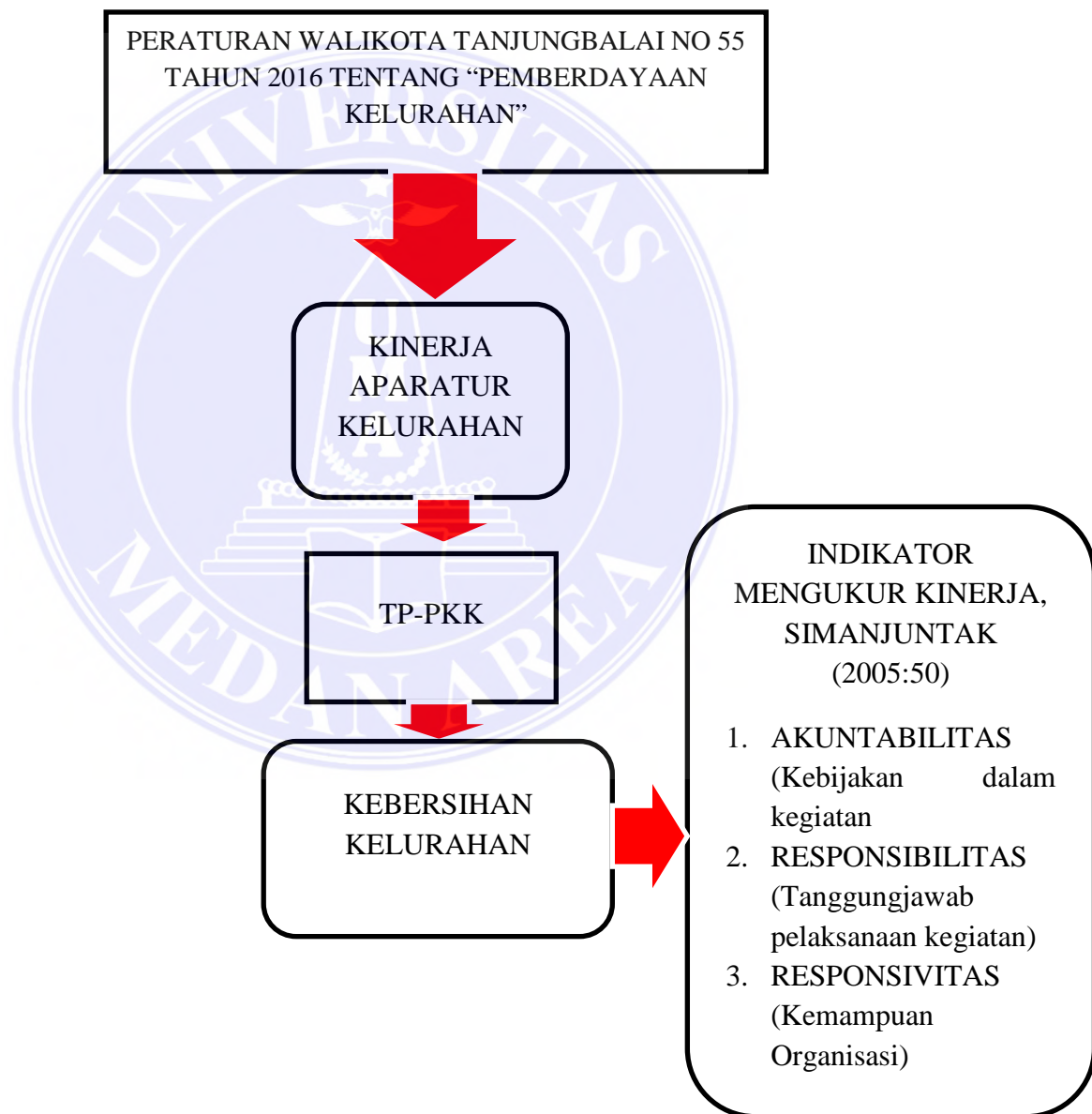
Dalam Pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu Camat dalam hal :

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
- b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Inti dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses partisipatif yang memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk mengkaji, tantangan utama pembangunan, hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan mempertajam keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab apa yang ia kerjakan.

### Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang ditentukan dalam penelitian terhadap Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV yang terdiri dari lima lingkungan, tepatnya berada di Jalan Amir Hamzah No 63 Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan, yaitu awal bulan Februari sampai Maret 2019.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dengan argument yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami Analisis Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tanjungbalai Kota IV.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer
  - a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut sebagai informan.
  - b. Observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan serta menjaring data yang tidak terjangkau.
2. Teknik pengumpulan data sekunder
  - a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, makalah dan majalah-majalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
  - b. Studi Dokumentasi (*Documentary*) yaitu dengan menggunakan dokumen hukum kearsipan catatan-catatan yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

### 3.4. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi informan kunci dan informan tambahan.

- a. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Adapun

Informan Kunci dalam penelitian ini ialah : Sekretaris Lurah, Ketua TP PKK dan Sekretaris TP PKK

- b. Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Lingkungan dan Masyarakat setempat.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna (Sujana dalam Sujarweni, 2014)

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor, 2010:254)

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisis data meliputi :

#### **1. Pengumpulan Data**

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

### **3.6. Definisi Konseptual dan Operasional**

Definisi Konseptual dan Operasional dalam penelitian ini ialah Kinerja Program Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh aparaturnya Kelurahan dalam menghimbau dan menyakinkan masyarakat melalui pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat/tokoh-tokoh masyarakat untuk mengikuti Program Pemberdayaan Kelurahan dalam hal ini

untuk mendukung program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan. Kinerja Kelurahan dalam proses pemberdayaan dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas aparat dalam memberikan pelayanan.

- a. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam Pemberdayaan Kebersihan Kelurahan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap kemajuan Kelurahan
- b. Dalam kaitannya dengan responsibilitas ini akan dilihat dari tanggungjawab aparatur pemerintah Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dan kesadaran masyarakat setempat
- c. Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi Kelurahan Tanjungbalai Kota IV dalam mengenali kebutuhan masyarakat, yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat mengenai kebersihan lingkungan yang nantinya akan menyebabkan serangan penyakit.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Dessler, Gary. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management 7e, jilid 2*. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Gibson, dkk. 2002. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Erlangga, Jakarta.
- Handayani, Soewarno. 2000. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung, Jakarta.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Keban Jeremias, T. 2005. *Indikator kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Makalah, Fspol UGM, Yogyakarta.
- Khairuddin, H. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Refika Aditya, Bandung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Mathis, Robert L dan Jhon H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Buku II, diterjemahkan oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie*. Salemba empat, Jakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prabu, Anwar. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna . 2014. *Metodologi penelitian*. Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Penerbit FEUI, Jakarta.
- Supardi dan Syaiful Anwar. 2002. *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*. UII Press, Yogyakarta.

### **Jurnal :**

1. Hasil Penelitian Rotic Makapuas, 2017. Dengan judul “Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan dalam rangka Pelayanan Masyarakat (Studi di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten SITARO)
2. Hasil Penelitian Muh.Zulkarnain, 2017. Dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gawo”.
3. Hasil Penelitian Hendra Dermawan, 2008. Dengan judul “Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan (Studi di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia).
4. Hasil Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah studi pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutam, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.
5. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Mei-Agustus 2010, Halaman 160-169 Vol 17, No 2
6. Jurnal MIMBAR Volume 29, No.1 (Juni, 2013) : 33-40

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Walikota Tanjung balai No 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah

### **Internet :**

[https://www.scribd.com/doc/112055046/Proposal-Skripsi-Evaluasi-Kinerja Aparatur-Kelurahan-Sungai-Kerjan-Bungo-Dani-Umb](https://www.scribd.com/doc/112055046/Proposal-Skripsi-Evaluasi-Kinerja-Aparatur-Kelurahan-Sungai-Kerjan-Bungo-Dani-Umb) di akses tgl 15 November 2018 pukul 13:00 Wib.

[https://www.academia.edu/20432098/Efektivitas\\_Pelayanan\\_Publik\\_di\\_Kelurahan\\_Srijaya\\_Kecamatan\\_Alang-alang\\_Lebar\\_Kota\\_Palembang](https://www.academia.edu/20432098/Efektivitas_Pelayanan_Publik_di_Kelurahan_Srijaya_Kecamatan_Alang-alang_Lebar_Kota_Palembang) di akses tgl 15 November 2018 pukul 13:00 Wib

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/69> di akses tgl 15 November 2018 pukul 13:00 Wib

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7872/7434> di akses tgl 15 November 2018 pukul 13:00 Wib

**Sumber Lainnya :**

- |                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Sekretaris Lurah     | : Bapak Putra Siregar                           |
| 2. Ketua TP PKK         | : Ibu Inong Syam                                |
| 3. Sekretaris TP PKK    | : Ibu Satyam SH                                 |
| 4. Kepala Lingkungan II | : Bapak Samhan                                  |
| 5. Masyarakat           | : Bapak Syamsuddin<br>Ibu Limah<br>Bapak Rasyid |





## Lampiran I

### Foto depan tampilan gedung Kelurahan Tanjungbalai Kota IV



### Foto Atribut dan papan informasi Kelurahan Tanjungbalai Kota IV





## Lampiran II : Foto Kegiatan Gotong Royong



## Foto gotong royong Lurah dan Masyarakat



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20



**Lampiran III:  
Sosialisasi Lurah terkait Posyandu**



**Kegiatan Sosialisasi di ruangan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV**



**Lampiran IV :  
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Masyarakat**

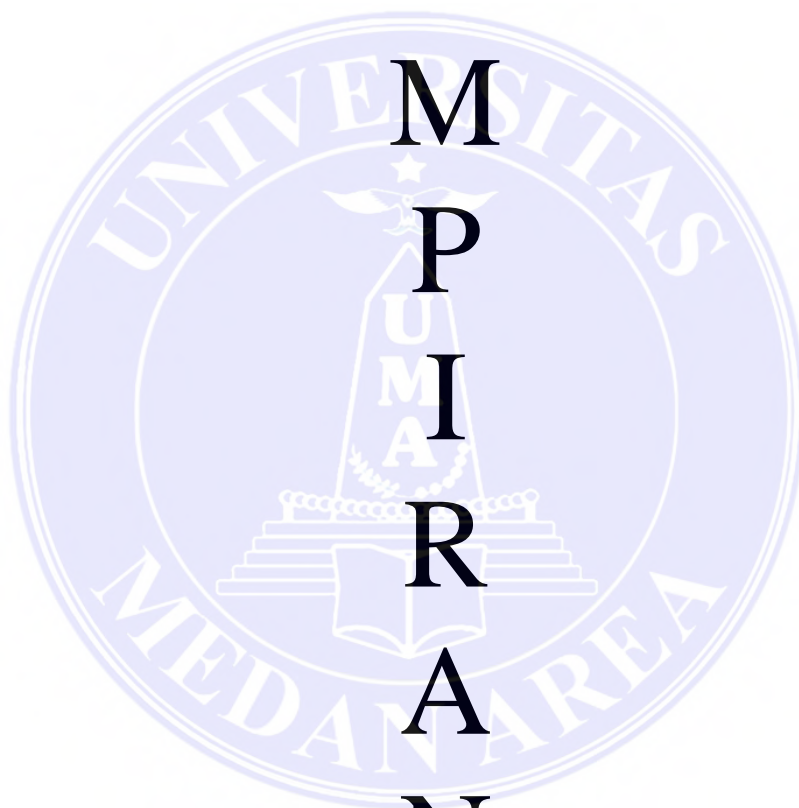


**Kegiatan Sosialisasi Lurah dengan Tokoh-tokoh Masyarakat**





L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/1/20

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))24/1/20